

ABSTRAK
**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA LOTTEMART DALAM HAL
TERJADI CACAT DALAM PRODUK KEMASAN MAKANAN**

Produk yang menjadi kebutuhan primer kita sebagai makhluk hidup adalah pangan, dengan era perkembangan kemajuan produk kemasan makanandijual dalam bentuk kemasan dengan berbagai alasan ingin mencari praktis, mudah dan bisa dibawa kemana-mana. Namun di pasaran masih beredar kemasan itu sudah kadaluwarsa / telah terkontaminasi, yang telah berubah sifat dan hakekat dari makanan itu sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan di lapangan masih kurang maksimal oleh pemerintah khususnya bagian pangan. Institusi pemerintah yang khusus menangani pangan di Indonesia yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pikiran tentang perlindungan hak-hak konsumen dan diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya pengembangan hukum perlindungan konsumen, serta untuk mengetahui tanggung jawab apa yang dilakukan oleh pelaku usaha pada konsumen.

Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, adapun spesifikasi penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisa wawancara secara terbuka (*open interview*).

Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap cacat dalam produk kemasan makanan di Kota Semarang, seharusnya selaras dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Meski peraturan mengenai perlindungan konsumen terhadap cacat produk dalam kemasan makanan sudah sangat jelas, namun dalam kenyataannya di lapangan masih saja ditemukan produk kemasan cacat yang lolos dari pengawasan pemerintah, khususnya dalam bidang pangan yaitu, BPOM dan Dinas Ketahanan Pangan.

Simpulan yang didapat penulis yaitu bahwa bekerjanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal melindungi konsumen dari peredaran cacat dalam produk kemasan makanan. Peran pemerintah dalam mengawasi bahan pangan tahu berformalin juga sudah maksimal, namun masih ada pelaku usaha yang lolos dari pengawasan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan Kemasan, Badan POM

ABSTRACT
RESPONSIBILITIES OF LOTTEMART BUSINESS ACTIVITIES IN
THINGS HAPPEN TO DISABILITY IN FOOD PACKAGING PRODUCTS

Products that are our primary needs as living things are food, with the era of progress in food packaging products sold in the form of packaging for various reasons to want to find practical, easy and can be carried everywhere. But the market is still circulating, the packaging has expired / has been contaminated, who have changed the nature and essence of the food so that it no longer qualifies for consumption. This proves that supervision in the field is still not optimal by the government, especially the food sector. Government institutions specifically dealing with food in Indonesia, namely the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM).

The purpose of this study is to contribute ideas about the protection of consumer rights and is expected to be useful for the general public and in particular the development of consumer protection laws, and to find out what responsibilities are carried out by business actors to consumers.

The research method uses an empirical juridical method, while the research specifications are descriptive qualitative. While the method used in analyzing and processing the collected data is an open interview analysis (open interview).

Research on consumer protection against defects in food packaging products in the city of Semarang, should be in line with what is in Law Number 8 of 1999. Although the regulations regarding consumer protection against defects in food packaging products are very clear, in reality in the field there are still defective packaging products that have escaped government supervision, especially in the food sector, namely BPOM and the Food Security Service.

The conclusion obtained by the author is that the operation of Law Number 18 of 2012 concerning Food is in line with Law Number 8 of 1999 concerning the protection of consumers in terms of protecting consumers from the distribution of defects in food packaging products. The role of the government in supervising tofu and formalin ingredients has also been maximized, but there are still business people who have escaped supervision. The conclusion obtained by the author is that the operation of Law Number 18 of 2012 concerning Food is in line with Law Number 8 of 1999 concerning the protection of consumers in terms of protecting consumers from the distribution of defects in food packaging products. The role of the government in supervising tofu and formalin ingredients has also been maximized, but there are still business people who have escaped supervision.

Keywords: Consumer Protection, Packaging Food, POM Agency